BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kantor Dinas perkebunan Provinsi jawa Barat, dengan berpedoman kepada Permendagri no 30 tahun 2007, yang efektif efisien, ekonomis transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan atau kecurangan, serta terlaksananya pengelolaan dengan baik yang taat akan hukum. Permendagri tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, agar tidak keluar jalur dan tetap berada diprosedur yang sebenarnya.
2. Kebijakan Kantor dinas Perkebunan berdasarkan Permendagri No. 26 tahun 2006, tentang pedoman penyususnan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bahwa pedoman pengelolaan APBD memiliki kebijakan, yaitu mencakup sikronisasi kebijakan pemerintah daerah. Yang dimaksud dari sinkronisasi adalah keserasian kebijakan pemerintah dengan kebijakan

penyelenggaraan pemerintah daerah. Apabila kebijakan pemeirntah daerah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah telah sejalan dengan perundang-undangan, maka pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah di kantor dinas perkebunan dapat berjalan dengan lancar karena adanya keserasian kebijakan tersebut.

3. Prosedur dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Dinas perkebunan provinsi Jawa Barat, berpedoman kepada Permendagri No. 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Karena dalam pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, agar tercipta ketaatan pada undang-undang yang telah ditetapkan. Setiap langkah yang dilaksanakan dinas perkebunan mulai dari perencanaan, perbendaharaan, pertanggungjawaban, pemeriksaan sampai pencairan dana harus didasari peratuaran perundang-undangan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran antara lain:

1. Agar tidak terjadi penyimpangan atau kecurangan dalam pengelolaan anggran pendapatan dan belanja daerah harus memberikan perhatian khusus dan

pengawasan yang ketat. Hal ini bisa diberikan oleh sluruh staf dan pegawai dinas perkebunan terutama di bagian keuangan yang mempunyai tanggungjawab besar.

2. Apabila keserasian kebijakan pemerintah dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah tidak berjalan lagi dengan semestinya, jangan sampai kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ikut menurun. Pegawai dinas perkebunan harus mempunyai prinsip yang kuat untuk tetap melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tetap berjalan berdasarkan perundang-undangan. Untuk menanam prinsip tersebut dibutuhkannya motivasi dari kepala-kepala sub bagian.
3. Demi terlaksananya prosedur pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja berjalan dengan baik setiap tahunnya, selain taat peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, seluruh pegawai yang bertanggungjawab harus memiliki sifat yang jujur dalam pekerjaannya mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah, dimulai dari perencanaan sampai pencairan dana. Karena anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan keuangan negara yang tidak bisa sembarangan dalam mengelolanya.